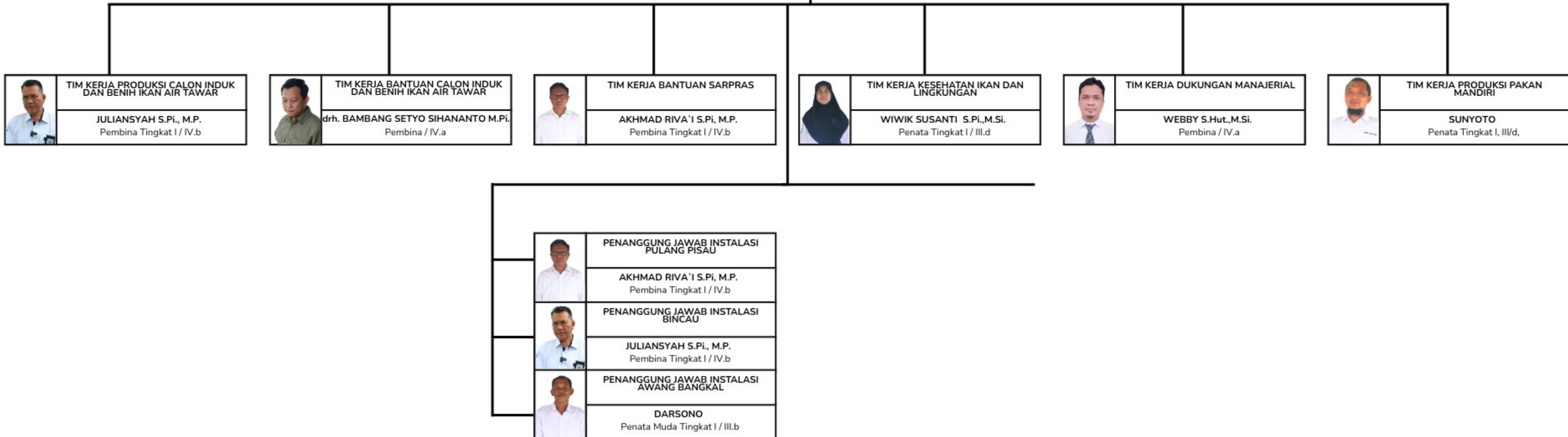
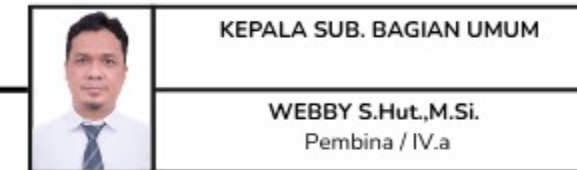


STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN TAHUN 2026





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

VISI & MISI PPID



VISI

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MISI

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik.



TUGAS & FUNGSI BALAI



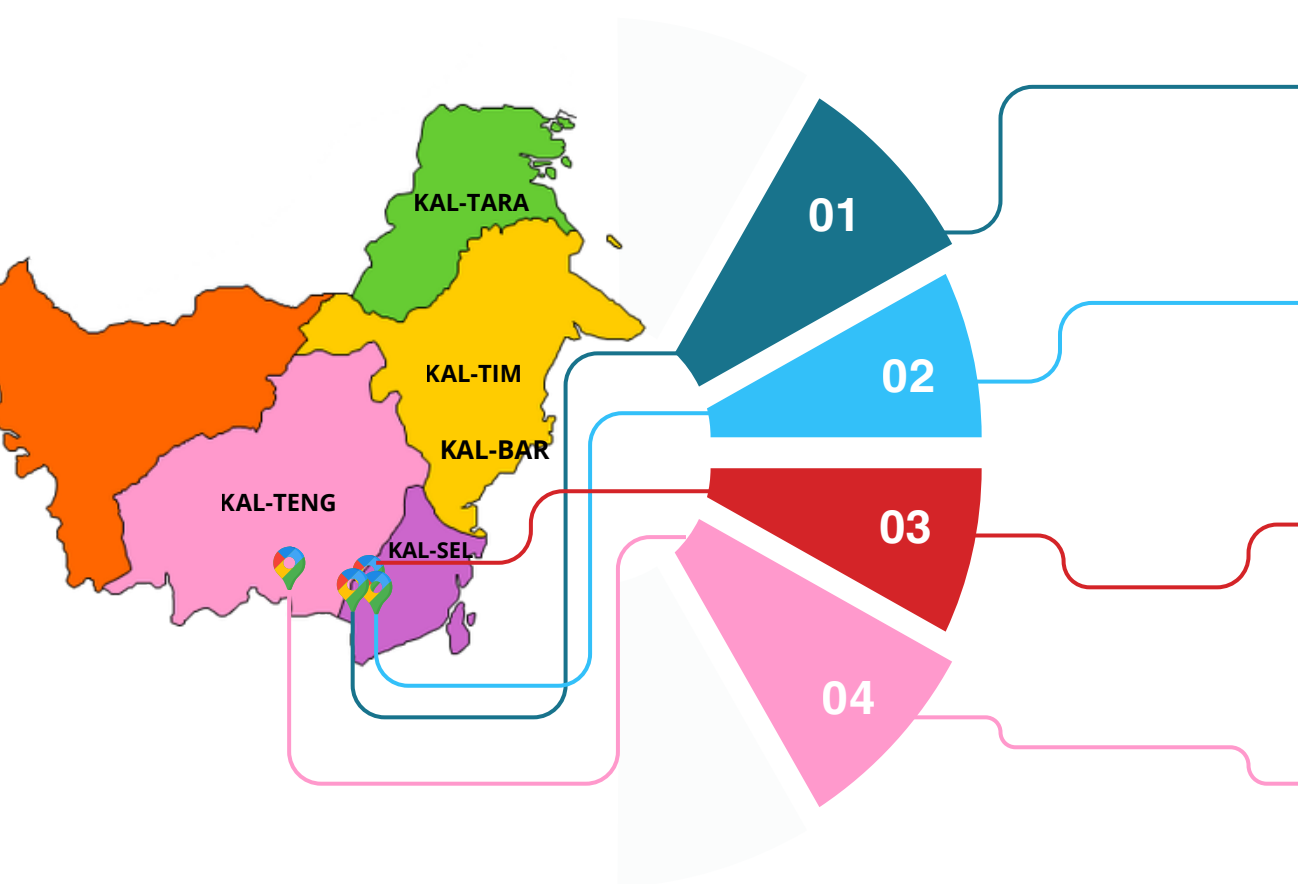
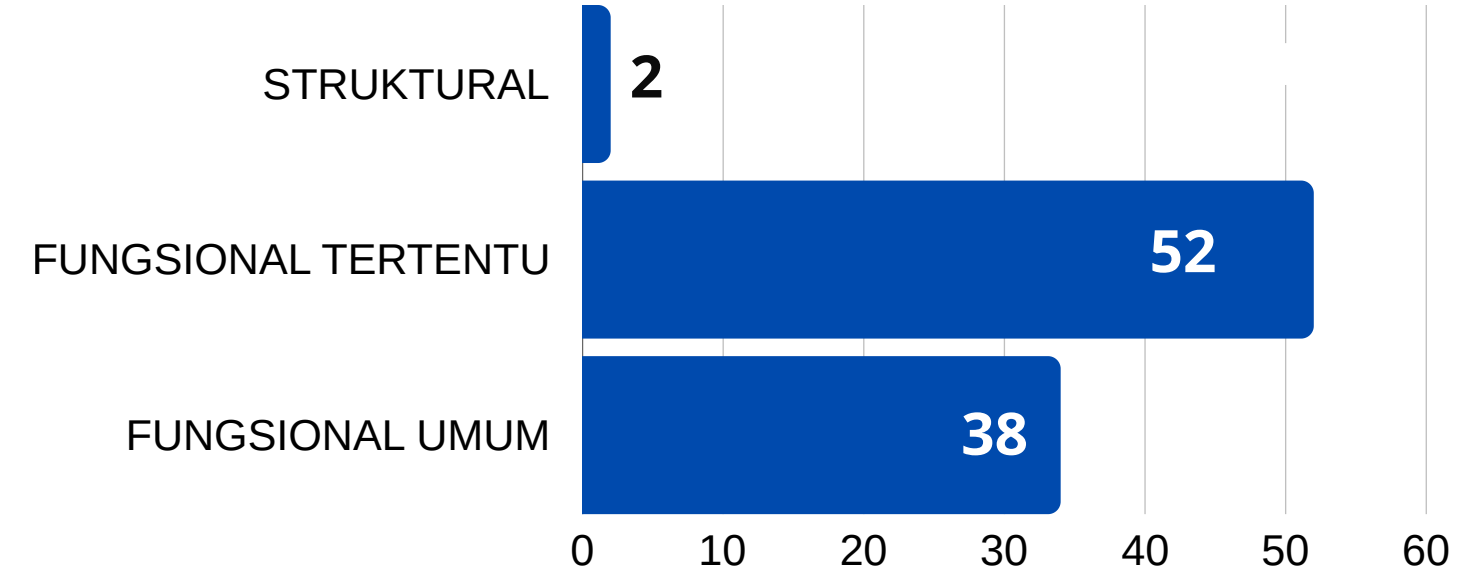
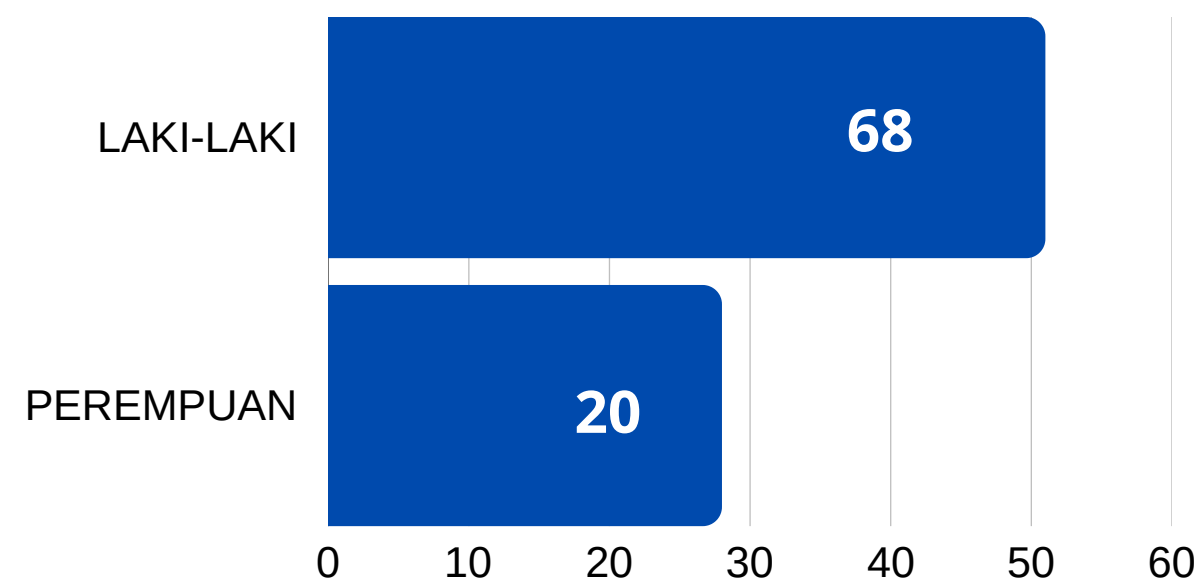
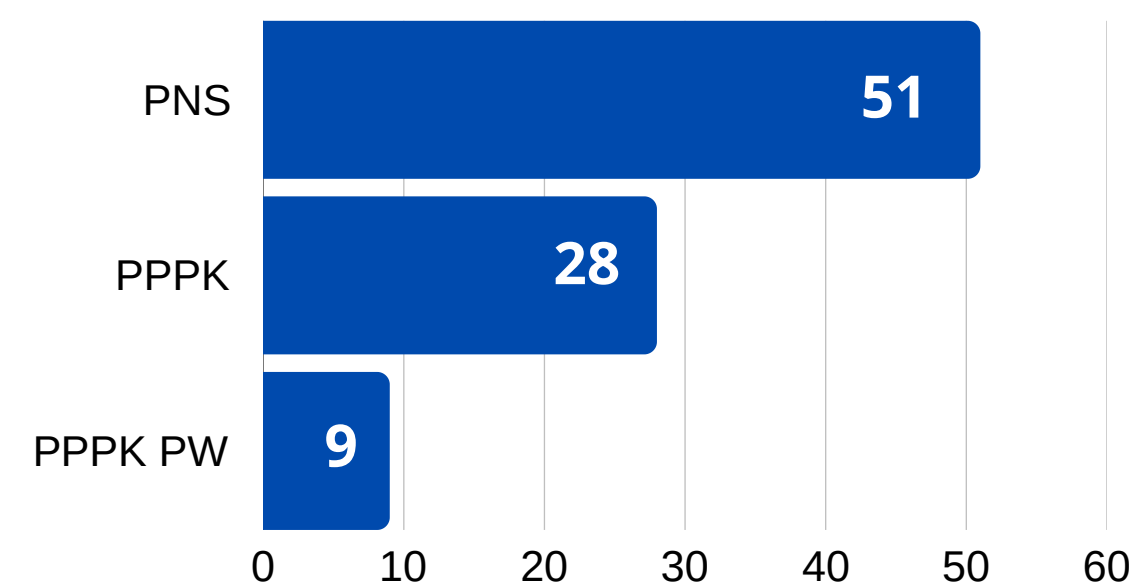
TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, BPBAT Mandiangin mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

FUNGSI

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar;
6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SDM BPBAT MANDIANGIN



KANTOR UTAMA BPBAT MANDIANGIN			
PNS	PPPK	PPPK	OS
41	17	7	1



INSTALASI AWANG BANGKAL			
PNS	PPPK	PPPK	OS
1	1	-	-



INSTALASI BINCAU			
PNS	PPPK	PPPK	OS
4	6	-	3



INSTALASI PULANG PISAU			
PNS	PPPK	PPPK	OS
5	4	2	2

PELANGGARAN TERKAIT KEPEGAWAIAN

TAHUN 2025

Periode Januari - Desember Tahun 2025, Tim Kode Etik Belum Pernah Menemukan Pelanggaran Terkait Kepegawaian Baik Pelanggaran Dalam Katergori Ringan, Sedang, Maupun Berat di Lingkungan BPBAT Mandiangin

TAHUN 2025

Periode Januari - Juni Tahun 2026, Tim Kode Etik Belum Pernah Menemukan Pelanggaran Terkait Kepegawaian Baik Pelanggaran Dalam Katergori Ringan, Sedang, Maupun Berat di Lingkungan BPBAT Mandiangin



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

JALAN TAHURA SULTAN ADAM KM. 14 MANDIANGIN KEC. KARANG INTAN
KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN 70661 TELP: 0811 500 4658
EMAIL: op.bpbatmandiangin@kkp.go.id LAMAN: www.kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN
Nomor B.19/BPBAT.MDG/KP.440/I/2026

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Penugasan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin;

MEMBERI TUGAS

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 7) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 8) Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 9) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin;
- 10) Memberikan pertimbangan dan Kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi, serta mekanisme pemberian informasi;
- 11) Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 12) Mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin.

B. Petugas Layanan Informasi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- 2) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi;
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi layanan publik;
- 4) Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
- 5) Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 6) Menyiapkan dan memelihara informasi dan dokumentasi publik;

C. Petugas Layanan Informasi Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan konsultasi, klasifikasi informasi publik;
- 3) Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 4) Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- 5) Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

D. Petugas Layanan Informasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Informasi

- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
- 2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- 3) Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;
- 4) Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi.ajudikasi informasi.

Ditetapkan di Mandiangin,

Pada tanggal : 5 Januari 2026

~ Pit. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
Mandiangin,



Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.

Lampiran : Surat Penugasan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
Nomor : B.19/BPBAT.MDG/KP.440/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN**

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.	Ka. BPBAT Mandiangin	Pejabat PPID
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI			
2.	Amrih Manunggal, S.St.Pi.	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
3.	Febri Handika Putra, S.Sn.	Pranata Humas Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
4.	M. Khalis	Teknisi Akuakultur Pemula	Petugas Layanan Informasi
5.	Putri Permata Sari	Teknisi Akuakultur Pemula	Petugas Layanan Informasi
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
6.	Puji Widodo, S.Pi.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi
7.	Andri Hariadi, S.Si.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Mandiangin,
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Pit. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
Mandiangin,



Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KEUANGAN TA. 2025 (Unaudited)

BALAI PERIKANAN
BUDIAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN



BBATMANDIANGIN@GMAIL.COM



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mandiangin, 31 Desember 2025
Pt. Kepala BPBAT Mandiangin

Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.
NIP. 198212052009011003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	1
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	5
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	14
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	43
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Mandiangin, 31 Desember 2025
P.t. Kepala BAT Mandiangin

Samsul Bahraw, S.St.Pi., M.Sc.
NIP. 196212052009011003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,398,662,364 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,398,662,364 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20,305,130,069 atau mencapai 98.47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20,620,143,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp56,554,245,001 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2,056,537,937; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp54,497,707,064 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp41,966,198 dan Rp56,512,278,803

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,281,455,364 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24,885,413,005 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-23,603,957,641, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing masing sebesar Rp2,008,571,980 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21,595,385,661.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp59,136,850,351, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-21,595,385,661 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 64,346,408 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 18,906,467,705 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp56,512,278,803

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BPBAT) adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pengembangan budidaya air tawar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

Fungsi

- Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan,
- Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar, Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya air tawar,
- Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar,
- Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar,
- Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya air tawar,
- Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar,
- Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar,
- Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar,
- Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar, dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditugaskan BPBAT Mandiangin telah menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin sebagai Pusat Pelayanan dan Pengawasan Teknologi Budidaya Air Tawar yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan

Misi

1. Mewujudkan kemandirian perikanan pembudidaya melalui pemanfaatan sumberdaya berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Mewujudkan produk perikanan budidaya berdaya saing melalui peningkatan teknologi inovatif
3. 3.Memanfaatkan sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,250,000,000	-
Jumlah Pendapatan	1,250,000,000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	9,454,467,000	9,752,076,000
Belanja Barang	12,230,263,000	10,768,067,000
Belanja Modal	195,000,000	100,000,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	21,879,730,000	20,620,143,000

Realisasi Pendapatan
Rp1,398,662,364

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,398,662,364 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,398,662,364. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Pendapatan Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin terdiri

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1,398,662,364	-
Jumlah	-	1,398,662,364	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 29.91 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,398,662,364	1,995,583,903	(29.91)
Jumlah	1,398,662,364	1,995,583,903	(29.91)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,398,662,364 dan Rp1,995,583,903. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 29.91 dari TA 2024 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp108.589.500 mengalami penurunan

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,398,662,364	1,995,583,903	(29.91)
Jumlah	1,398,662,364	1,995,583,903	(29.91)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	33,648,200	(100.00)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1,124,106,464	1,283,668,361	(12.43)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	108,589,500	567,379,000	(80.86)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	69,655,900	17,357,000	301.31
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	87,693,000	63,555,000	37.98
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	8,617,500	29,976,342	(71.25)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1,398,662,364	1,995,583,903	(29.91)

B.2 Belanja

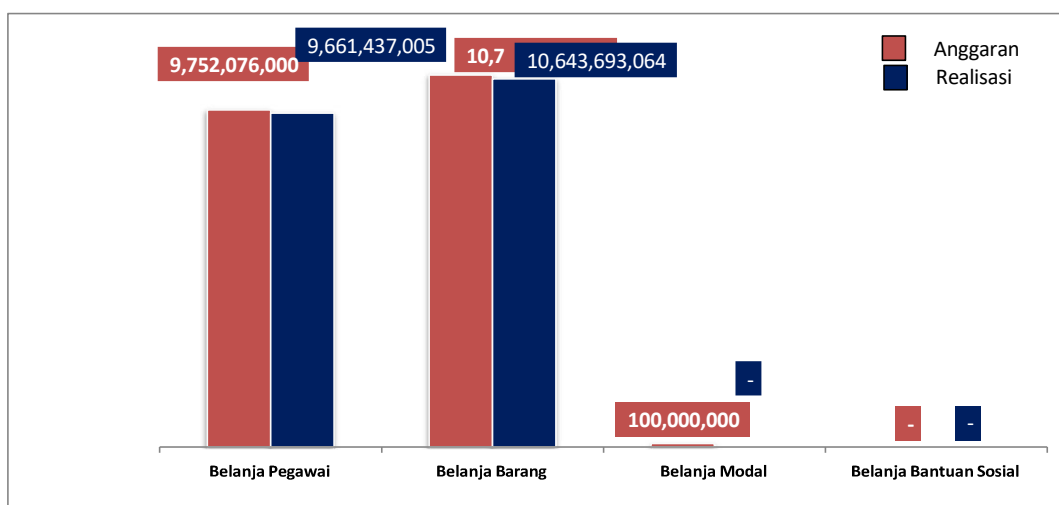
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp20,305,130,069 atau 98.47 % dari anggaran belanja sebesar Rp.20,620,143,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	9,752,076,000	9,661,437,005	99.07
Belanja Barang	10,768,067,000	10,643,693,064	98.84
Belanja Modal	100,000,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	20,620,143,000	20,305,130,069	98.47

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 37.43%
Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan realisasi sebesar 37% terhadap TA 2024 sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	9,661,437,005	9,317,272,597	3.69
Belanja Barang	10,643,693,064	21,917,758,244	(51.44)
Belanja Modal	-	1,215,849,800	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	20,305,130,069	32,450,880,641	(37.43)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,661,437,005 dan Rp9,317,272,597. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 3.69 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai pengangkatan PPPK TA.2024 pada bulan Oktober 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,865,595,740	2,990,863,300	(4.19)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	238,537,120	238,092,780	0.19
Belanja Tunj. Anak PNS	76,161,936	79,271,484	(3.92)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	15,480,000	(51.16)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	28,000,000	249,740,000	(88.79)
Belanja Tunj. PPh PNS	18,890,815	27,944,926	(32.40)
Belanja Tunj. Beras PNS	158,382,540	164,900,340	(3.95)
Belanja Uang Makan PNS	419,921,000	415,070,000	1.17
Belanja Tunjangan Umum PNS	19,470,000	22,260,000	(12.53)
Belanja Uang Lembur	27,079,000	18,631,000	45.34
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,347,472,989	4,209,836,068	3.27
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,706	41,830	(14.64)
Beban Gaji Pokok PPPK	521,494,300	329,750,000	58.15
Beban Pembulatan Gaji PPPK	11,058	6,506	69.97
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	37,123,270	21,631,840	71.61
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15,955,000	7,190,000	121.91
Beban Tunjangan Beras PPPK	35,340,960	19,046,460	85.55
Beban Uang Makan PPPK	117,505,000	64,831,000	81.25
Beban Tunjangan Anak PPPK	9,671,526	4,484,104	115.68
Belanja Uang Lembur PPPK	23,546,000	6,015,000	291.45
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kiner	693,683,280	433,309,908	60.09
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	9,661,437,240	9,318,396,546	3.68
Pengembalian Belanja Pegawai	235	1,123,949	(99.98)
Jumlah Belanja	9,661,437,005	9,317,272,597	3.69

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10,643,693,064 dan Rp21,917,758,244. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 51.44% dari Realisasi TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	759,234,020	1,171,777,292	(35.21)
Belanja Barang Non Operasional	631,566,389	2,321,303,914	(72.79)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,673,072,795	2,896,555,720	(42.24)
Belanja Jasa	1,459,041,866	1,167,653,906	24.95
Belanja Pemeliharaan	631,069,402	1,368,225,560	(53.88)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	463,524,640	2,094,121,852	(77.87)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	5,026,183,952	10,898,120,000	(53.88)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	10,643,693,064	21,917,758,244	(51.44)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	10,643,693,064	21,917,758,244	(51.44)

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1,215,849,800. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tahun 2025 seluruh pagu yang tersedia mengalami pemblokiran.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	817,860,800	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	397,989,000	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1,215,849,800	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1,215,849,800	(100.00)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, mengalami penurunan sebesar 100.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	817,860,800	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	817,860,800	(100.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	817,860,800	(100.00)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp397,989,000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	397,989,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	397,989,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	397,989,000	(100.00)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Terdapat ketidaksesuaian akun belanja dengan Kode BMN senilai Rp49.994.500,00 yaitu belanja menggunakan akun peralatan mesin ekstrakomtabel (521252) dengan harga satuan diatas batas kapitalisasi berikut rinciannya :

No	Item	Unit	Harga Satuan (Rp.)	Harga Total (Rp.)
1	Kursi Besi	8	1,508,220.00	12,065,760.00
2	Meja Rapat	1	8,808,240.00	8,808,240.00
3	Set Sofa	2	11,465,020.00	22,930,040.00
4	Meja Ruang Tamu	2	2,155,020.00	4,310,040.00
5	Lemari Es	1	3,518,000.00	3,518,000.00
6	Ac Split	2	8,280,000.00	16,560,000.00
7	Coffe Maker	1	1,604,000.00	1,604,000.00
8	Pompa Submersible	1	3,629,000.00	3,629,000.00
9	Pompa Submersible	1	1,927,000.00	1,927,000.00
10	Blower	4	7,100,000.00	28,400,000.00
			Total	103,752,080.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

B.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin per 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

B.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin per 30 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

B.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

B.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

-

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

B.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah

pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

-

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1,000,000	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1,000,000		#VALUE!

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember

2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan
(Unaudited) TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

*Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0*

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0*

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp2,056,537,937

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,056,537,937 dan Rp2,458,105,307. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	386,116,574	465,251,155
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,400,498,932	1,638,666,482
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku	4,508,631	6,965,670
Persediaan Lainnya	265,413,800	347,222,000
Jumlah	2,056,537,937	2,458,105,307

Persediaan tersebut di atas dalam Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp24,284,286,000 dan Rp24,284,286,000. Nilai Tanah tersebut Tidak ada Mutasi Tambah atau Kurang pada Nilai Tanah pada periode semester II Tahun Anggaran 2025. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	24,284,286,000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	24,284,286,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp36,785,885,410

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp36,785,885,410 dan Rp36,869,133,330. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	36,869,133,330
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	187,000,000
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	36,682,133,330
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(32,824,203,732)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3,857,929,598

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp30,518,180,139

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30,518,180,139 dan Rp30,518,180,139. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	30,518,180,139
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	30,518,180,139
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(6,872,517,583)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	23,645,662,556

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp4,112,912,800

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.4,112,912,800 dan Rp.4,112,912,800. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	4,112,912,800
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	4,112,912,800
Akumulasi Penyusutan s.d.	(1,616,338,570)
Nilai Buku per	2,496,574,230

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp109,502,600

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.109,502,600 dan Rp.109,502,600. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	109,502,600
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	109,502,600
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	109,502,600

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp41,313,059,885 dan Rp39,248,774,144. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	36,785,885,410	(32,824,203,732)	3,961,681,678
2	Gedung dan Bangunan	30,518,180,139	(6,872,517,583)	23,645,662,556
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,112,912,800	(1,616,338,570)	2,496,574,230
4	Aset Tetap Lainnya	109,502,600	-	109,502,600
Akumulasi Penyusutan		71,526,480,949	(41,313,059,885)	30,213,421,064

C.39 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp1,657,248,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	1,657,248,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	187,000,000
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1,844,248,000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,844,248,000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp1,579,748,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp41,966,198

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp41,966,198 dan Rp43,995,681. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :
Utang pihak ketiga adalah Pembayaran Listrik Bulan Desember 2025

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan :

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Ekuitas
Rp56,512,278,803

C.47 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56,512,278,803. dan Rp59,136,850,351. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan
Rp0

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1,281,455,364

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1,281,455,364 dan Rp1,399,664,407. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8.45. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	33,648,200.00	(100.00)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,	1,124,106,464	1,283,668,361.00	(12.43)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	69,655,900	17,357,000.00	301.31
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	87,693,000	63,555,000.00	37.98
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	1,435,846.00	(100.00)
Jumlah	1,281,455,364.00	1,399,664,407.00	(8.45)

Beban Pegawai
Rp9,661,437,005

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,661,437,005 dan Rp9,317,272,597.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 3.69 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,865,595,740	2,990,863,300	(4.19)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	238,537,120	238,092,780	0.19
Beban Tunj. Anak PNS	76,161,936	79,271,484	(3.92)

Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	15,480,000	(51.16)
Beban Tunj. Fungsional PNS	28,000,000	249,740,000	(88.79)
Beban Tunj. PPh PNS	18,890,815	27,944,926	(32.40)
Beban Tunj. Beras PNS	158,382,540	164,900,340	(3.95)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	9,661,437,005	9,317,272,597	3.69

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,820,580,415 dan Rp3,127,205,558

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 41.78 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	1,620,710,876	2,345,255,728	(30.89)
Beban Persediaan bahan baku	169,368,539	715,109,830	(76.32)
Beban Persediaan Lainnya	30,501,000	66,840,000	(54.37)
Jumlah Beban Persediaan	1,820,580,415.00	3,127,205,558	(41.78)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,744,060,712 dan Rp4,692,176,751.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 41.52 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	598,053,820	922,183,492	(35.15)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,441,700	3,678,200	20.76
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115,200,000	126,600,000	(9.00)
Beban Barang Operasional Lainnya	41,538,500	119,315,600	(65.19)
Beban Bahan	185,606,969	718,216,799	(74.16)
Beban Honor Output Kegiatan	24,480,000	773,760,000	(96.84)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	315,955,340	789,531,115	(59.98)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,772,000	39,796,000	(95.55)
Beban Langganan Listrik	546,922,709	617,715,415	(11.46)
Jumlah	2,744,060,712	4,692,176,751.00	(41.52)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp631,069,402 dan Rp1,368,505,560.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 53.89 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	217,237,700	592,036,100	(63.31)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,965,000	29,496,700	(83.17)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	366,971,402	738,713,480	(50.32)
Beban Pemeliharaan Jaringan	41,895,300	7,979,280	425.05
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	280,000	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	631,069,402	1,368,505,560	(53.89)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp463,524,640 dan Rp2,094,121,852

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 77.87 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	457,025,640	1,962,471,852	(76.71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,499,000	131,650,000	(95.06)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	463,524,640.00	2,094,121,852	(77.87)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,190,308,682 dan Rp13,537,478,780

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 46.89 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,101,718,730	2,084,319,280.00	0.83
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	5,088,589,952	11,453,159,500.00	(55.57)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	7,190,308,682.00	13,537,478,780	(46.89)

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2,374,432,149*

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,374,432,149 dan Rp2,764,207,793.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,353,568,725	1,756,981,992	(22.96)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	800,714,428	796,341,805	0.55
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19,608,209	19,608,209	-
Beban Penyusutan Irigasi	96,381,555	96,381,555	-
Beban Penyusutan Jaringan	17,309,232	17,394,232	(0.49)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Di	86,850,000	77,500,000	12.06
Jumah Penyusutan	2,374,432,149	2,764,207,793	(14.10)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	2,374,432,149	2,764,207,793	(14.10)

D.11 **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 **Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-515,886,554 dan Rp-262,700,792

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(624,476,054)	(830,079,792.00)	(25)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	108,589,500	567,379,000.00	(81)
Jumlah	(515,886,554.00)	(262,700,792)	96

D.13 **Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp2,524,458,534

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,524,458,534 dan Rp3,349,964,007.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	8,617,500	29,976,342.00	(71.25)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2,515,691,034	3,303,508,390.00	(23.85)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	9,844,500	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(9,694,500)	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	16,479,275.00	(100)
Jumlah	2,524,458,534.00	3,349,964,007	(24.64)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.59,136,850,351.00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.59,136,850,351.00 dan Rp.60,812,101,401.00

*Defisit LO
Rp.21,595,385,661.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.21,595,385,661.00 dan Rp.32,414,041,269.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.64,346,408 dan Rp.33,401,502 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp64,346,408

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.64,346,408 dan Rp.33,401,502. .
Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	64,346,408
Jumlah	64,346,408.0

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp18,906,467,705

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18,906,467,705 dan Rp.30,705,388,717. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	20,305,130,069
Diterima dari Entitas Lain	(1,398,662,364)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	18,906,467,705

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 20,305,130,069, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1,398,662,364

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.56,512,278,803.00 dan Rp.59,136,850,351.00.

Ekuitas Akhir
Rp56,512,278,803

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

terkait perbedaan nilai pendapatan pada LO (Rp1.281.455.364,00) dan LRA (Rp1.398.662.364,00) yaitu berupa penjualan alsin senilai Rp108.589.500,00 dan penerimaan belanja TAYL senilai Rp8.617.500,00

F.2 Prioritas Nasional

Realisasi Anggaran Prioritas Nasional pada BPBAT Mandiangin TA 2025 senilai Rp7.232.238.155,00 atau 97,37% dari target Rp7.427.427.000,00

Prioritas Nasional	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		Swasembada Pangan	7.427.427.000	7.232.238.155	97,37
	1	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	5.353.000.000	5.352.851.580	100
	2	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	331.998.000	237.435.110	71,52
	3	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	998.058.000	997.701.675	99,96
	4	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	17.366.000	17.350.700	99,91
	5	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang diproduksi	540.855.000	440.755.070	81,49
	6	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	186.150.000	186.144.020	100

F.1 Pengungkapan Capaian Rincian Output Perfungsi APBN

Realisasi Anggaran Prioritas Nasional pada BPBAT Mandiangin TA 2025 senilai Rp7.232.238.155,00 atau 97,37% dari target Rp7.427.427.000,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kegiatan	Capaian Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar di UPT BPBAT Mandiangin (Ekor)	Ekor	18.651	20.595	540,855,000.00	440,755,070
2	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	Ekor	9.197	14.020	331,998,000.00	237,435,110
3	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Mandiangin (Ekor)	Ekor	4.286.646	3.766.500	998,058,000.00	997,701,675
4	Pakan Ikan Air Tawar yang diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Mandiangin (Kg)	Kg	14.308	14.350	186,150,000.00	186,144,020
5	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Mandiangin (Unit)	Unit	25	27	5,353,000,000.00	5,352,851,580
6	Sampel AMR yang diuji Satker BPBAT Mandiangin (Sampel)	Sampel	19	27	17,366,000.00	17,350,700
7	Sampel Ikan Air Tawar, Pakan dan Obat Ikan yang diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBAT Mandiangin (Sampel)	Sampel	355	1137	122,387,000.00	94,962,995
8	Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBAT Mandiangin (Indeks)	Indeks	3	0	100,000,000.00	8,562,500
9	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Satker BPBAT Mandiangin (Persen)	Persen	86	0	100,000,000.00	
10	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBAT Mandiangin (Nilai)	Nilai	80	0	-	
11	Persentase Layanan Perkantoran BPBAT Mandiangin (Persen)	Persen	80	0	13,432,852,000.00	12,864,275,092

12	Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Mandiangin (Nilai)	Nilai	84	0		
13	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Mandiangin (Indeks)	Indeks	81	0		
14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Mandiangin (Persen)	Persen	100	0		
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Mandiangin (Persen)	Persen	85	0		
16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi Satker BPBAT Mandiangin (Nilai)	Nilai	76	0		
17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAT Mandiangin (Nilai)	Nilai	92			
18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAT Mandiangin (Nilai)	Nilai	71.5			
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAT Mandiangin (nilai)	Nilai	70	0		
20	Persentase Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAT Mandiangin (Persen)	Persen	76	0		

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 03/02/26 7:50 AM

Tgl Cetak : 03/02/26 12:59 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	386,116,574	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,400,498,932	0
0.0	117131	Bahan Baku	4,508,631	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	265,413,800	0
0.0	131111	Tanah	24,284,286,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	36,785,885,410	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	30,518,180,139	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	893,670,400	0
0.0	134112	Irigasi	2,528,781,400	0
0.0	134113	Jaringan	690,461,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	109,502,600	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	32,824,203,732
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,872,517,583
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	625,917,342
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	761,619,200
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	228,802,028
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	41,966,198
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,305,130,069
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,398,662,364	0
0.0	391111	Ekuitas	0	59,136,850,351
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	64,346,408
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,124,106,464
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	108,589,500
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	69,655,900
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	87,693,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,617,500
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	2,515,691,034
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	9,844,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,865,595,740	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,631	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	238,537,120	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	76,161,936	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	28,000,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,890,815	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	158,382,540	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	419,921,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 03/02/26 7:50 AM

Tgl Cetak : 03/02/26 12:59 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,470,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	521,494,300	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	10,898	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	37,123,270	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	9,671,526	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15,955,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	35,340,960	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	117,505,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	27,079,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	23,546,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,347,472,989	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	693,683,280	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	598,053,820	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,441,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115,200,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	41,538,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	185,606,969	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	24,480,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	315,955,340	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,772,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	546,922,709	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,392,128	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	93,940,186	0
3.0	522141	Beban Sewa	46,148,360	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	767,609,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	217,237,700	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,965,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	366,971,402	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	41,895,300	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	457,025,640	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,499,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,353,568,725	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	800,714,428	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19,608,209	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	96,381,555	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	17,309,232	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	86,850,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,620,710,876	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 03/02/26 7:50 AM

Tgl Cetak : 03/02/26 12:59 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,101,718,730	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	5,088,589,952	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	169,368,539	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	30,501,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	9,694,500	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	624,476,054	0
JUMLAH			124,785,550,809	124,785,550,809

Keterangan :

FINAL



Mandapura, 3 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Parasul Bahrawi, S.St.Pi, M.Sc

NIP.198212052009011003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 2:15 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	20,305,130,069
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,398,662,364	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	1,124,106,464
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	108,589,500
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	69,655,900
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	87,693,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,617,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,865,595,740	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,706	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	238,537,120	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	76,161,936	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	28,000,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,890,815	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	158,382,540	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	419,921,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,470,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	521,494,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11,058	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	37,123,270	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,671,526	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,955,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Makan Beras PPPK	35,340,960	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	117,505,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	27,079,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	23,546,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,347,472,989	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	693,683,280	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	598,053,820	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,441,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	115,200,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41,538,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	185,606,969	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,480,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	315,955,340	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	105,524,080	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,506,161,295	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 2:15 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	166,911,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	548,952,192	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,392,128	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	93,940,186	0
3.0	522141	Belanja Sewa	46,148,360	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	767,609,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	217,237,700	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,965,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	366,971,402	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	41,895,300	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	457,025,640	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,499,000	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	5,026,183,952	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	75
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	160
JUMLAH			21,703,792,668	21,703,792,668

Keterangan :

FINAL



Martapura, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Samsul Bahri, S.St.Pi, M.Sc

198212052009011003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 21/01/26 8:04 AM
Tgl Cetak : 21/01/26 12:53 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,281,455,364	1,399,664,407	(118,209,043)	(8.446)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,281,455,364	1,399,664,407	(118,209,043)	(8.446)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,281,455,364	1,399,664,407	(118,209,043)	(8.446)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9,661,437,005	9,317,272,597	344,164,408	3.694
Beban Persediaan	1,820,580,415	3,127,205,558	(1,306,625,143)	(41.783)
Beban Barang dan Jasa	2,744,060,712	4,692,176,751	(1,948,116,039)	(41.518)
Beban Pemeliharaan	631,069,402	1,368,505,560	(737,436,158)	(53.886)
Beban Perjalanan Dinas	463,524,640	2,094,121,852	(1,630,597,212)	(77.865)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7,190,308,682	13,537,478,780	(6,347,170,098)	(46.886)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 21/01/26 8:04 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 12:53 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,374,432,149	2,764,207,793	(389,775,644)	(14.101)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	24,885,413,005	36,900,968,891	(12,015,555,886)	(32.562)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(23,603,957,641)	(35,501,304,484)	11,897,346,843	(33.512)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(515,886,554)	(262,700,792)	(253,185,762)	96.378
Pendapatan Pelepasan Aset	108,589,500	567,379,000	(458,789,500)	(80.861)
Beban Pelepasan Aset	624,476,054	830,079,792	(205,603,738)	(24.769)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,524,458,534	3,349,964,007	(825,505,473)	(24.642)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,534,153,034	3,349,964,007	(815,810,973)	(24.353)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,694,500	0	9,694,500	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,008,571,980	3,087,263,215	(1,078,691,235)	(34.94)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21,595,385,661)	(32,414,041,269)	10,818,655,608	(33.376)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(21,595,385,661)	(32,414,041,269)	10,818,655,608	(33.376)

Keterangan :
FINAL

Martapura, 21 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Samsul Barrawi, S.St.Pi, M.Sc
NIP.198212052009011003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (567584) BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
MANDIANGIN

Tgl Data : 21/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 21/01/26 10:26 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	59,136,850,351	60,812,101,401	(1,675,251,050)	(2.75)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21,595,385,661)	(32,414,041,269)	10,818,655,608	(33.38)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	64,346,408	33,401,502	30,944,906	92.65
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	64,346,408	33,401,502	30,944,906	92.65
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,906,467,705	30,705,388,717	(11,798,921,012)	(38.43)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,624,571,548)	(1,675,251,050)	(949,320,498)	56.67
EKUITAS AKHIR	56,512,278,803	59,136,850,351	(2,624,571,548)	(4.44)

Keterangan :

FINAL

Martapura, 21 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Samsul Bahari, S.St.Pi, M.Sc

NIP. 198212052009011003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1500
SATUAN KERJA : 567584
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
KALIMANTAN SELATAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/01/26 10:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/1/26 9:25 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,010,000,000	2,865,597,000	2,865,595,740	0	2,865,595,740	100	1,260
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56,000	39,000	35,706	75	35,631	91.36	3,369
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	280,000,000	238,539,000	238,537,120	0	238,537,120	100	1,880
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	84,000,000	76,164,000	76,161,936	0	76,161,936	100	2,064
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,000,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	280,000,000	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,000,000	18,934,000	18,890,815	0	18,890,815	99.77	43,185
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	168,000,000	158,383,000	158,382,540	0	158,382,540	100	460
511129	Belanja Uang Makan PNS	425,000,000	425,000,000	419,921,000	0	419,921,000	98.8	5,079,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,000,000	19,470,000	19,470,000	0	19,470,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,326,056,000	3,837,686,000	3,832,554,857	75	3,832,554,782	99.87	5,131,218
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	226,876,000	521,496,000	521,494,300	0	521,494,300	100	1,700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	42,000	42,000	11,058	160	10,898	25.95	31,102
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	28,000,000	37,125,000	37,123,270	0	37,123,270	100	1,730
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,900,000	9,674,000	9,671,526	0	9,671,526	99.97	2,474
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	67,100,000	15,955,000	15,955,000	0	15,955,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24,000,000	35,341,000	35,340,960	0	35,340,960	100	40
511628	Belanja Uang Makan PPPK	72,000,000	120,000,000	117,505,000	0	117,505,000	97.92	2,495,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	422,918,000	739,633,000	737,101,114	160	737,100,954	99.66	2,532,046
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	43,150,000	28,150,000	27,079,000	0	27,079,000	96.2	1,071,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	15,000,000	23,746,000	23,546,000	0	23,546,000	99.16	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	58,150,000	51,896,000	50,625,000	0	50,625,000	97.55	1,271,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,215,343,000	4,429,177,000	4,347,472,989	0	4,347,472,989	98.16	81,704,011
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	432,000,000	693,684,000	693,683,280	0	693,683,280	100	720
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	4,647,343,000	5,122,861,000	5,041,156,269	0	5,041,156,269	98.41	81,704,731
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	9,454,467,000	9,752,076,000	9,661,437,240	235	9,661,437,005	99.07	90,638,995
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	191,130,000	598,221,000	598,053,820	0	598,053,820	99.97	167,180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1500
SATUAN KERJA : 567584
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
KALIMANTAN SELATAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/01/26 10:10 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/1/26 9:25 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000,000	4,540,000	4,441,700	0	4,441,700	97.83	98,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68,040,000	115,200,000	115,200,000	0	115,200,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	121,738,000	41,540,000	41,538,500	0	41,538,500	100	1,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	395,908,000	759,501,000	759,234,020	0	759,234,020	99.96	266,980
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	572,604,000	193,254,000	185,606,969	0	185,606,969	96.04	7,647,031
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,176,000	24,480,000	24,480,000	0	24,480,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	644,936,000	316,344,000	315,955,340	0	315,955,340	99.88	388,660
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	105,607,000	105,524,080	0	105,524,080	99.92	82,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,236,716,000	639,685,000	631,566,389	0	631,566,389	98.73	8,118,611
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,582,291,000	1,621,005,000	1,506,161,295	0	1,506,161,295	92.92	114,843,705
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	168,300,000	166,912,000	166,911,500	0	166,911,500	100	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,750,591,000	1,787,917,000	1,673,072,795	0	1,673,072,795	93.58	114,844,205
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	720,000,000	548,960,000	548,952,192	0	548,952,192	100	7,808
522112	Belanja Langganan Telepon	5,000,000	2,500,000	2,392,128	0	2,392,128	95.69	107,872
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	90,000,000	94,000,000	93,940,186	0	93,940,186	99.94	59,814
522141	Belanja Sewa	15,000,000	46,200,000	46,148,360	0	46,148,360	99.89	51,640
522151	Belanja Jasa Profesi	58,800,000	0	0	0	0		0
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,291,000,000	767,609,000	767,609,000	0	767,609,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,179,800,000	1,459,269,000	1,459,041,866	0	1,459,041,866	99.98	227,134
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	398,900,000	217,468,000	217,237,700	0	217,237,700	99.89	230,300
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	55,000,000	5,000,000	4,965,000	0	4,965,000	99.3	35,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	686,548,000	367,412,000	366,971,402	0	366,971,402	99.88	440,598
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	150,000,000	42,000,000	41,895,300	0	41,895,300	99.75	104,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,290,448,000	631,880,000	631,069,402	0	631,069,402	99.87	810,598
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,210,300,000	457,130,000	457,025,640	0	457,025,640	99.98	104,360
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	156,500,000	6,500,000	6,499,000	0	6,499,000	99.98	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,366,800,000	463,630,000	463,524,640	0	463,524,640	99.98	105,360
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	4,010,000,000	5,026,185,000	5,026,183,952	0	5,026,183,952	100	1,048

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1500
SATUAN KERJA : 567584
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
KALIMANTAN SELATAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/01/26 10:10 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/1/26 9:25 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	4,010,000,000	5,026,185,000	5,026,183,952	0	5,026,183,952	100	1,048
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,230,263,000	10,768,067,000	10,643,693,064	0	10,643,693,064	98.84	124,373,936
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	195,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	195,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	JUMLAH BELANJA	21,879,730,000	20,620,143,000	20,305,130,304	235	20,305,130,069	98.47	315,012,931

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1500
SATUAN KERJA : 567584

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
KALIMANTAN SELATAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/01/26 12:58 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	1,173,100,000	1,124,106,464	0	1,124,106,464	95.82
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	108,589,500	0	108,589,500	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	32,500,000	69,655,900	0	69,655,900	214.33
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,205,600,000	1,302,351,864	0	1,302,351,864	108.03
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	44,400,000	87,693,000	0	87,693,000	197.51
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	44,400,000	87,693,000	0	87,693,000	197.51
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,617,500	0	8,617,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	8,617,500	0	8,617,500	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,250,000,000	1,398,662,364	0	1,398,662,364	111.89
	JUMLAH PENDAPATAN	1,250,000,000	1,398,662,364	0	1,398,662,364	111.89